

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (LKj-IP OPD)



DISUSUN OLEH:
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, LKj-IP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKj-IP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2023, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lombok Tengah

Namun demikian, dalam penyusunan LKj-IP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format maupun substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj-IP dimasa mendatang.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj-IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya secara lebih sinergis.

Praya, 31 Desember 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah,



Murdi, AP, M.Si,

NIP. 197512311994121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kerangka pembangunan *good governance* kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja kegiatan, program dan kebijakan tahun 2023, dilakukan melalui Evaluasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan pelaksanaan anggaran serta realisasi APBD tahun 2023.

Dengan mengetahui tingkat kinerja yang dicapai, capaian anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya pada tahun 2023 maupun di tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada tahun yang akan datang.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian keuangan yang telah dilakukan, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan baik, walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :

- terbatasnya kompetensi dan kualifikasi staf / SDM untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi
- kurangnya sarana dan prasarana dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang dilakukan adalah :

1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, dan data data lain yang berhubungan dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah	5
1.2. Data Kepegawaian	6
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	10
II.2. Rencana Kerja Tahunan	12
II.3. Indikator Kinerja Utama	14
II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	20
III.2.1 Sasaran 1	22
III.2.2 Sasaran 2	25
III.2.3 Sasaran 3	37
III.2.4 Sasaran 4	38
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah (disertai dengan analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja)	43
III.4. Akuntabilitas Keuangan	45
BAB IV PENUTUP	54
Lampiran	55
MATRIKS HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, dalam salah satu pasalnya, mengatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Karenanya prinsip akuntabilitas mengharuskan dalam setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi** di bawah ini :

1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok :

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.2. Fungsi :

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan secara integratif dapat diarahkan kepada pencapaian sasaran yang memungkinkan terlaksananya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut:

Tabel 1.1
REGISTER PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Keadaan : 31 Desember 2023

N O	NAMA	L / P	Gol	Esel on	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Murdi, AP, M.Si	L	IV/b	IIb	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-2 Ilmu Politik	ADUM	
2	Masujiadi, SH	L	IV/a	IIIa	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-1 Ilmu Hukum	Diklatpim IV	
3	H. Amirudin Nur, SE	L	IV/a	IIIb	Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Diklatpim IV	
4	Herwin Ahwanudin, SH	L	IV/a	IIIb	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	S-1 Ilmu Hukum	Diklatpim IV	
5	Fero Ramdhoni, S.IP	L	III/d	IIIb	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Kesatuan Bangsa	S-1 Ilmu Pemerintahan	Diklatpim IV	
6	M. Sabri, S.Sos	L	III/d		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim IV	
7	Sri Hidayati, SE	P	III/d		Perencana Ahli Muda	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Diklatpim IV	
8	Suhartono, S.IP	L	III/c	IVa	Kasubbag Umum, Kepegawaian & Keuangan	S-1 Ilmu Pemerintahan	Diklatpim IV	
9	Samsurriyadi, S.Sos	L	III/c		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Administrasi Negara		

10	Baiq Damar Asri, SE	P	III/c		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan		
11	Ahmad Hanapi, S.IP	L	III/c		Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	S-1 Ilmu Pemerintahan		
12	Anwarul Fadli Yunfauzi, S.STP, MM	L	III/b		Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	S-2 Magister Manajemen		
13	Hassugian Putra Kusuma, A.Md.T	L	III/b		Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat	D-III Teknik		
14	Lalu Wiragune, S.Adm	L	III/b		Pengadministrasi Umum pada Bidang Pembinaan Politik dan Ormas	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
15	Lalu Alfian, SH	L	III/a		Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	S-1 Ilmu Hukum		
16	Monica Christine Batubara, SE	P	III/a		Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat	S-1 Ilmu Akuntansi		
17	Ubaidillah, SH	L	III/a		Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wawasan dan Kesatuan Bangsa	S-1 Ilmu Hukum		
18	Juwaini	L	II/d		Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	SLTA – Madrasah Aliyah		
19	Hani Fitriati	P	II/d		Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Umum,	SLTA – IPS		

					Kepegawaian & Keuangan			
20	Lalu Muhammad Saleh	L	II/d		Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wawasan dan Kesatuan Bangsa	SLTA - Bahasa		
21	Haerul Muchson	L	II/c		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan	SLTA - Bahasa		
22	Damanhuri	L	II/c		Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wawasan dan Kesatuan Bangsa	SLTA - IPS		
23	H. Nasri	L	II/a		Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan	SD – Paket C		

Berdasarkan tabel kualifikasi pegawai diatas, SDM/Aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dianggap memiliki kapasitas dari aspek tingkat pendidikan, sementara aspek pengetahuan dan keterampilan masih perlu peningkatan.

I.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 98 TAHUN 2021**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14
MURDI, AP., M.Si	

SEKRETARIS BADAN	12
MASUJIADI, SH.	

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	9
SUHARTONO, S.IP	

JABATAN PELAKSANA	
HAERUL MUCHSON	5
MONIKA CHRISTINE BATUBARA, SE.	7
HASSUGIAN PUTRA KUSUMA, S.AP	5
HANI FITRIATI	5
H. NASRI	1

PERENCANA AHLI MUDA	9
SRI HIDAYATI, SE	

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	11
LALU HERWIN AKHWANUDIN, SH.	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	9
PELAKSANA	
ANWARUL FADLI YUNFAUZI, S.STP, MM	5
LALU ALFAN, SH	5
AHMAD HANAFI, S.IP	5
JUWAINI	5

BIDANG POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11
H. AMIRUDIN NUR, SE.	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	9
M. SABRI, S.Sos.	
SYAMSURIADI, S.Sos.	
PELAKSANA	
LALU WIRAGUNE, S.Adm.	5

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN DAN KETAHANAN BANGSA	11
FERO RAMDHONI, S.IP	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	9
BAIQ DAMAR ASRI, SE.	
PELAKSANA	
UBAIDILILLAH, SH.	5
LALU MUHAMAD SALEH	5
DAMANHURI	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu arah kebijakan yang di susun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada **Misi ke-1** yaitu : "Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat". Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah ditugaskan untuk membantu tercapainya tujuan Kepala Daerah yang berfokus pada pencapaian sasaran Misi 1 baik pada sasaran 1 dan sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat" dan "Meningkatnya Moderasi Beragama". Dimana hal tersebut akan dituangkan pada "Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial" serta "Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya". Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan peran lembaga mediasi desa dalam penyelesaian konflik sosial, dengan cara Bale Mediasi Kabupaten yang akan menjadi media penyelesaian konflik perdata maupun pidana ringan di tengah masyarakat baik dari tingkat desa sampai kabupaten. Dimana Bale Mediasi akan beranggotakan Tokoh-tokoh Agama dan tenaga-tenaga ahli sebagai mediator di tengah masyarakat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Sekretariat Bale Mediasi Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam mencapai sasaran ke 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam pembinaan dan koordinasi dengan Forum kerukunan Beragama atau FKUB.

TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu **"TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT"** dan **"TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT."**

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan sasaran **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya”**, **“Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan”**, **“Meningkatnya Kohesivitas Sosial”** dan **“Meningkatnya Kualitas Demokrasi”**

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 S.D. 2026

Instansi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya Nilai-Nilai Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan sosial budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA Tertangani	1. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat kerukunan antar umat beragama	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	

2. Terwujudnya Nilai-Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/Ormas dan Parpol 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 	
		Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pementapan wawasan kebangsaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama/tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 	
	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan Survey Kerukunan Umat beragama dan Survey Indeks Demokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 	

II.2 Rencana Kerja Tahunan

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 (terlampir).

Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2023. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

**RENCANA KERJA TAHUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

SKPD : (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Tahun : (2023)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA tertangani	100 %
2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %
	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %
3. Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,32
4. Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	67,32
5. Terlaksananya Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Bebas Temuan	Persentase Capaian Kerja Anggaran Instansi	100 %
6. Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	100 %

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
								1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA tertangani	Konflik berlatar belakang SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda	Jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik dikali 100	1. Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Badan	0	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	Konflik berlatar belakang politik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah	Jumlah konflik berlatar belakang politik dibagi jumlah konflik dikali 100	1. Bidang Pembinaan Politik dan Ormas 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Badan	0	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	Konflik berlatar belakang sosial ekonomi adalah Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan dan pertentangan antar latar belakang sosio kultural dan adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi.	Jumlah konflik berlatar belakang sosial ekonomi dibagi jumlah konflik dikali 100	1. Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Badan	0	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan		Diukur menggunakan statistik inferensial dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada skala : 0 – 20 = Sangat Rendah 21 - 40 = Rendah 41- 60 = Sedang 61- 80 = Tinggi 81-10 = Sangat Tinggi	Survey	Kepala Badan	67,12	67,12	67,22	67,32	67,42	67,52	67,52	67,52
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi		Metode penghitungan Indeks Demokrasi menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain, pada skala : 0 – 20 = Sangat Rendah 21 - 40 = Rendah 41- 60 = Sedang 61- 80 = Tinggi 81-10 = Sangat Tinggi	Survey	Kepala Badan	67,12	67,12	67,22	67,32	67,42	67,52	67,52	67,52
Definisi Operasional (DO) Indeks Kerukunan dan Indeks Demokrasi :														
							ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR					
							Kebebasan Sipil	Kebebasan berkumpul dan berserikat	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul					
									Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul					



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Murdi, AP, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama akan berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak ke dua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,

H. Lalu Pathul Bahri, S.IP

Pihak Pertama,

Murdi, AP., M.Si.
NIP. 197512311994121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase konflik berlatar belakang SARA tertangani	100 %
2	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %
		Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,32
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	67,32
5	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Bebas Temuan	Persentase Capaian Kerja Anggaran Instansi	100 %
6	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	100 %

Belanja Daerah

Anggaran

Ket.

1	Belanja Operasi	Rp. 7,724,859,592	APBD
2	Belanja Modal	Rp. 337,371,546	APBD

Praya, Januari 2024



Pihak Kedua,

H. Lalu Pathul Bahri, S.IP



Pihak Pertama,

Murdi, AP., M.Si.

NP. 197512311994121002

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : Bakesbangpol

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Murdi, AP,M.Si	NAMA	H. Lalu Pathul Bahri, S.IP
NIP	197512311994121002	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda /IVc	PANGKAT/GOL RUANG	Bupati Lombok Tengah
JABATAN	Kepala Badan	JABATAN	
INSTANSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	INSTANSI	-
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani	100 %
	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase Konflik Berlatar Belakang Politik terselesaikan	100 %
		Persentase Konflik Berlatar Belakang Sosial Ekonomi terselesaikan	100 %
	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,32
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	67,32
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Bebas Temuan	Persentase Capaian Kerja Anggaran Instansi	100 %
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	100 %
B. KINERJA TAMBAHAN			

Praya, Januari 2024



Pihak Kedua,

H. Lalu Pathul Bahri, S.IP



Pihak Pertama,

Murdi, AP., M.Si.
NIP. 197512311994121002

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGAT KURANG

III.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun sebelumnya			Target awal renstra 2024	Sumber Data
						2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani	%	100	100	100%	100	100	100	100	Dokumen tasi, Laporan
2	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	%	100	100	100%	100	100	100	100	Dokumen tasi, Laporan
3	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	%	100	100	100%	100	100	100	100	Dokumen tasi, Laporan
4	Indeks Kerukunan	Poin	67,32	55,67	82,69	-	-	-	67,42	Survey
5	Indeks Demokrasi	Poin	67,32	57,34	85,17	-	-	-	67,42	Survey
6	Persentase Capaian Kerja Anggaran Instansi	%	100	96.45	96,45%	93,04	97,6	97	100	Dokumen tasi, Laporan
7	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	%	100	100	100%	100	100	100	100	Dokumen tasi, Laporan
RATA-RATA					100%	KRITERIA Tahun 2023: BAIK				

Sasaran Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Indikator Ke – 1 : Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani

- Konflik berlatar belakang SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Persentase konflik berlatar belakang SARA tertangani dihitung dengan rumus Jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik dikali 100

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya konflik SARA di Kabupaten Lombok Tengah, upaya pencegahan yang dilakukan dimulai dari deteksi dini adanya potensi konflik hingga upaya penyelesaian agar potensi tersebut tidak menjadi sebuah peristiwa konflik. Dengan adanya penanganan yang cepat dan tepat tersebut maka potensi konflik tersebut dapat diredam dan diselesaikan dengan baik sehingga sepanjang tahun 2023 tersebut di Kabupaten Lombok Tengah tidak terjadi konflik SARA

Kondisi ini jika dikaitkan dengan realitas dilingkungan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tentunya sangat relevan mengingat sepanjang tahun 2023 wilayah Kabupaten Lombok Tengah aman dan kondusif dari ancaman konflik SARA serta kehidupan masyarakat yang rukun hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian indeks kerukunan umat beragama yang di laksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan Praja dan Akademisi IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat serta Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia, dimana dari hasil penilaian tersebut diperoleh hasil sebesar 55,67 poin dengan kategori berada di level sedang.

- Capaian Kinerja Sasaran Ke – 1 Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya dengan indikator Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani diuraikan di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)	Target Akhir Renstra	SumberData
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani	%	100	100	100 %	100	100	1. Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dengan indikator Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani pada Tahun 2023 mencapai 100 % atau termasuk dalam kategori Baik karena berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 %.
- Untuk mendukung pencapaian target pada indikator Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator program yaitu “Persentase Desa yang Mencanangkan Desa Bebas Narkoba” dengan satu kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan serta dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa antara lain diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	46,15 %	89,74%	Tercapai	194,45	69,23 %

- Dari tabel evaluasi capaian kinerja program diatas, dengan target indikator kinerja 46,15 % realisasinya tercapai sebesar 89,74 % dengan persentase 194,45 % yang mana telah melebihi target yang telah ditetapkan, pencapaian yang melebihi target ini dapat dipenuhi salah satunya dengan melakukan pergeseran anggaran guna menjangkau pelaksanaan kegiatan yang terlalu mepet waktunya dengan berakhirnya tahun anggaran. Pelaksanaan

kegiatan inti yang menunjang pencapaian target indikator kinerja program dilakukan bekerjasama dengan beberapa stakeholder yang terkait dengan tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain melakukan kolaborasi dengan BNN dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat serta FKUB Kabupaten Lombok Tengah. Dalam upaya meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi dengan menyelenggarakan rapat koordinasi para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lombok Tengah serta memberikan bantuan berupa rehabilitasi Gedung sekretariat kepada pengurus FKUB Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa (IWKB) melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator kinerja “Persentase Desa yang Menganangkan Desa Bebas Narkoba” antara lain :

1. Rehab Sedang Gedung Kantor FKUB;



2. Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Rumah Ibadah di 12 kecamatan;



3. Pelatihan Pengorganisasian Fasilitator Desa Bersih Narkoba sebanyak 2 angkatan yang diikuti oleh 40 Desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Narkoba



2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan

a. Indikator Ke – 1 : Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan

b. Indikator Ke – 2 : Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan

- Konflik berlatar belakang politik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan dihitung dengan rumus Jumlah konflik berlatar belakang politik dibagi jumlah konflik dikali 100

- Konflik berlatar belakang sosial ekonomi adalah Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan dan pertentangan antar latar belakang sosio kultural dan adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi.

Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan dihitung dengan rumus Jumlah konflik berlatar belakang sosial ekonomi dibagi jumlah konflik dikali 100

- Capaian kinerja Sasaran Ke – 2 Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan dengan indikator Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan dan Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan diuraikan di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)	Target Akhir Renstra	SumberData
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	%	100	100	100 %	100	100	1. Bidang Pembinaan Politik dan Ormas 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	%	100	100	100 %	100	100	1. Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dengan indikator Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan dan Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan pada Tahun 2023 mencapai 100 % atau termasuk dalam kategori Baik karena berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 %.
- Untuk mendukung pencapaian target pada indikator Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan dan Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan dilaksanakan melalui empat (4) program yaitu :
 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan
 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Evaluasi Capaian Kinerja empat program diatas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1
Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100 %	100 %	Tercapai	100	100

- Dari tabel evaluasi capaian kinerja program diatas, dengan target indikator kinerja 100 % realisasinya tercapai sebesar 100 % dikarenakan tingginya antusias peserta dalam mengikuti kegiatan – kegiatan dan banyaknya peserta dari kalangan muda. Beberapa kegiatan inti yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan (IWKB) terkait capaian kinerja.
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik antara lain :
 1. Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera sebanyak 33 Orang yang diseleksi dari seluruh SMA/SMK/MA se-Kabupaten Lombok Tengah



Pada kegiatan ini jumlah peserta yang direkrut sebagai Paskibra Tingkat Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 33 orang yang berasal dari siswa-siswi SLTA yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok

Tengah dan sesuai dengan kebijakan dalam regulasi dari pemerintah pusat kegiatan tersebut dialihkan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah. Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemkab. Lombok Tengah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah selaku pihak penyelenggara pendidikan paskibraka Kabupaten Lombok Tengah. Untuk keterlibatan pihak eksternal yaitu Kodim 1602/ Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah dan organisasi PPI Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembentukan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah selaku pihak yang mengirim anggota Paskibra. Sedangkan keterlibatan instansi lainnya pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku Pembina Paskibraka Tingkat Nasional

2. Pelatihan Kepemimpinan bagi Calon Duta Pancasila Paskibraka sebanyak 40 orang yang berasal dari Paskibraka Angkatan 2022 dan Angkatan 2023;



3. Melaksanakan Kegiatan Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan oleh 60 orang yang dibarengi dengan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke 78



- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan 3 (tiga) indikator program Indikator program ke 1 yaitu “angka partisipasi pemilih dalam PEMILU”, indikator program ke 2 yaitu “Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi” sedangkan indikator program ke 3 yaitu “Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik “ dimana Program dan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas pada tahun 2023 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Indikator ke 1 pada program ini yaitu angka partisipasi pemilih dalam PEMILU untuk tahun 2023 tidak ada target yang ditetapkan hal ini dikarenakan pada tahun ini tidak ada pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan yang dapat digunakan untuk menghitung capaian indikator tersebut. Meskipun demikian program kegiatan yang mendukung sasaran tersebut tetap dilaksanakan hal ini dimaksudkan agar pencapaian target yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat tercapai yaitu angka partisipasi pemilih dalam PEMILU dengan target sebesar 76% mengingat pada tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia yaitu Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Indikator ke 2 yaitu Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi pencapaian target mencapai 50 % dari target 50 % atau tercapai 100 %

Indikator ke 3 yaitu persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik pencapaian target dilakukan dengan Melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan bidang politik. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah. Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Lombok Tengah tentang regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di NKRI dibidang politik

Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas antara lain diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.2

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Politik dan Ormas Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Angka Partisipasi Pemilih dalam PEMILU	0	0	Tidak terukur dikarenakan tidak ada PEMILU dalam Tahun berjalan	0	0
2.	Persentase PARPOL yang Melaksanakan Fungsi Kaderisasi	100 %	100 %	Tercapai	100	100 %
3.	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	50 %	50 %	Tercapai	100	65 %

Dari tabel evaluasi capaian kinerja program diatas, dengan 3 target indikator kinerja yaitu 0, 100 % dan 50 % persentase realisasinya tercapai sebesar 100 % kecuali indikator kinerja Angka Partisipasi Pemilih dalam PEMILU yang realisasi 0 disebabkan Tidak bisa terukur karena tidak ada PEMILU dalam Tahun berjalan. Kegiatan inti yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas (POLORMAS) yang terkait dengan pencapaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik antara lain :

1. Koordinasi dengan KPU dan BAWASLU terkait Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik





2. Pelayanan kepada Partai Politik terkait Bantuan Hibah Partai Politik



3. Pembentukan Tim Desk untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pembentukan tim desk ini dimaksudkan untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar. Keanggotaan dalam tim desk ini meliputi unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

4. Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan sebagai anggota di DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pemberian bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam regulasi dari pemerintah pusat dengan mekanisme besaran bantuan keuangan yang diberikan sesuai dengan jumlah perolehan suara partai politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini bertujuan untuk mendukung partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota partai maupun simpatisannya serta kepada masyarakat umum

5. Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator program yaitu “Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi”

dimana Program dan kegiatan–kegiatan Bidang Politik dan Ormas pada tahun 2023 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas antara lain diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.3

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Politik dan Ormas Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Ormas yang Aktif dalam Manajemen Administrasi	90 %	90 %	Tercapai	100	93 %

Dari tabel evaluasi capaian kinerja program diatas, dengan target indikator kinerja yaitu 90 % persentase realisasinya tercapai sebesar 100 %. Pencapaian target indikator dilakukan dengan meningkatkan kinerja pada tiap kegiatan terutama dalam kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas (POLORMAS) terkait pencapaian kinerja Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase Ormas yang Aktif dalam Manajemen Administrasi antara lain :

1. Pembahasan Naskah Akademik Ranperda Pembinaan Ormas



2. Dialog Publik Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik



3. Pelayanan SKM



- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan 1 (satu) indikator program yaitu “Persentase Penyelesaian Konflik Sosial”, dimana Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada tahun 2023 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.
Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.4
Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100 %	100 %	Tercapai	100	100 %

Dari tabel evaluasi capaian kinerja program diatas, dengan target indikator kinerja yaitu 100 % persentase realisasinya tercapai sebesar 100 %. Pencapaian realisasi target 100 % didukung oleh tindakan SDM yang aktif dalam penyelesaian konflik, peran mitra seperti Bale Mediasi yang tinggi serta koordinasi dan kerjasama mitra APH (aparatus Penegak Hukum) sangat baik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain :

1. Bale Mediasi dan Restorative Justice



**LAPORAN HASIL MEDIASI PERJANJIAN DAMAI ANTARA DESA KETARE DAN DESA
SEGALANYAR DI AULA RAPAT KANTOR BUPATI LOMBOK TENGAH.**

Senin, 11 Desember 2023.

I. PERIHAL : laporan hasil mediasi perjanjian damai antara desa ketare dan desa segalanyar di aula rapat kantor bupati lombok tengah.

II. FAKTA-FAKTA

Pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 11.45 s.d 15.00 WITA, bertempat di aula rapat kantor Bupati Lombok Tengah, telah berlangsung mediasi antara desa ketare dan segalanyar yang di hadiri oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama di masing-masing desa sebagai perwakilan.

A. Yang hadir dalam acara tersebut adalah :

- Bupati Lombok Tengah
- Wakil Bupati Lombok Tengah
- Kapolres Lombok Tengah
- Kasdim Kodim1620/Lombok Tengah
- Perwakilan Kejari Lombok Tengah
- Sekda Lombok Tengah
- Kaban Bakesbangpol
- Camat Pujut
- Kapolsek Pujut
- Danramil Pujut

B. Pukul 11.45 WITA, perwakilan Massa dari kedua desa tiba di ruang rapat dengan desa ketare sejumlah 18 Kadus dan Kades serta Desa Segalanyar dengan 16 Kadus dan kades.

C. Bupati Lombok Tengah menyampaikan kata pengantar, yang intinya :

- Kami sangat menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut mengingat kita ini merupakan saudara semua lebih-lebih desa ketare dan segalanyar masih memiliki hubungan kekeluargaan.
- Akibat dari bentrokan tersebut membuat jalur baypas menjadi terganggu yang tentunya mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar, mengingat jalur tersebut merupakan jalan yang di lalui oleh para wisatawan.
- Kami menginginkan kedepannya jangan sampai hal-hal serupa terulang kembali.

D. Penyampaian dari kades ketare yang intinya :

Kami sangat menyesalkan kejadian bentrok antara desa ketare dengan segalanyar. Kami juga tidak akan membela oknum pelaku tersebut tapi kami mengharpkan kedepannya sebagai pembelajaran bagi kita semua apabila terjadi hal serupa agar jangan sampai kita main hakim sendiri, kita harus menyerahkan kepada pihak berwajib.

E. Penyampaian kades segalanyar yang intinya.

Agara kedua belah pihak bisa saling menahan diri dan menyerahkan segala prosesnya kepada APH mengingat ada warga kami yang menjadi korban dalam bentrokan tersebut.

F. Penyampaian dari Kapolres Lombok Tengah yang intinya.

- Kami sangat menyayangkan terjadi bentrokan ini karena menyebabkan kerugian bagi para penggiat usaha

G. Pukul 13.10 WITA, Bupati membacakan isi kesepakatan perdamaian yang akan di tandatangani oleh kedua kubu yang berkonflik.

H. Selanjutnya penandatanganan di lakukan oleh kades dan kadus dari kedua belah pihak desa yang berseteru dan dilanjutkan sesi foto bersama.

I. Pukul 13.30 WITA acara berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

III. Pendapat Pelapor

A. Bahwa dalam mediasi tersebut telah di sepakati beberapa poin perjanjian.

B. Kedua desa sepakat untuk menghentikan perseteruan dan selanjutnya akan menyerahkan proses kepada APH apabila ada kerugian yang disebabkan oleh bentrokan tersebut.

2. Pengawasan Penyampaian Pendapat di Muka Umum



LAPORAN HASIL MONITORING AKSI DAMAI LSM SASAKA NUSANTARA NTB BERSAMA PEMILIK TANAH DI LOKASI PT. SAMARA LOMBOK DI DUSUN TOROK AIK BELEK DESA MONTONG AJI, KEC. PRAYA BARAT DAYA, KAB. LOMBOK TENGAH, PROV. NTB.

Rabu, 6 Desember 2023.

I. PERIHAL : laporan hasil monitoring aksi damai lsm sasaka nusantara ntb bersama pemilik tanah di lokasi pt. samara lombok di dusun torok aik belek desa montong aji, kec. praya barat daya, kab. lombok tengah, prov. ntb

II. FAKTA-FAKTA

Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.45 s.d 12.00 WITA, bertempat di Lokasi/Kantor Management PT. Samara Lombok alamat Dusun Torok Aik Belek, Desa Montong Aji, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB, telah berlangsung aksi damai yang dilakukan oleh sekitar ± 150 orang dari LSM Sasaka Nusantara NTB bersama masyarakat dan pemilik tanah yang dipimpin Korlap Aksi Sdr. Lalu Ibnu Hajar (Ketua Umum LSM Sasaka Nusantara NTB) terkait tentang dugaan adanya mafia tanah/kejahatan dalam pembebasan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan/Management PT. LOMBOK TOROK DEVELOPMENT (SAMARA LOMBOK AND GROUP) terhadap pemilik tanah seluas 9,5 Hektare.

A. Pukul 10.45 WITA, Massa aksi gabungan dari LSM Sasaka Nusantara NTB, masyarakat dan pemilik tanah tiba di depan pintu masuk menuju lokasi PT. Samara Lombok, tetapi massa dihadang oleh Security dan warga setempat (pendukung PT. Samara Lombok) yang bekerja di PT. Samara Lombok, agar tidak masuk ke areal lokasi PT. Samara Lombok.

- B. Perwakilan dari massa aksi a.n. Bpk. Lalu Hasan (LSM Sasaka Nusantara) menyampaikan beberapa hal, yang intinya :
- Bahwa massa aksi datang kesini untuk memperjuangkan hak masyarakat dan sudah membuat janji untuk melaksanakan hearing.
 - Meminta kepada pihak PT. Samara Lombok untuk tidak membenturkan massa aksi dengan warga lainnya.
 - Meminta kepada aparat keamanan untuk bisa memberikan kesempatan bertemu dengan pihak Manajemen PT. Samara Lombok untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan massa aksi.
 - Bahwa LSM Sasaka Nusantara NTB datang mendampingi masyarakat Desa Montong Aji untuk menuntut haknya.
- C. Bahwa LSM Sasaka Nusantara NTB datang mendampingi masyarakat Desa Montong Aji untuk menuntut haknya :
- D. Penyampaian dari Kadus Torok Aik Belek (Bpk. Basirun), yang intinya menghimbau untuk dilakukan mediasi oleh pihak Kecamatan, agar tidak terjadi bentrokan sesama warga sendiri, apabila tidak bisa diselesaikan di Kecamatan, maka bisa langsung diselesaikan (mediasi) di tingkat Kabupaten.
- E. Pukul 11.10 WITA, Manager PT. Samara Lombok Bpk. Fery Twulasawany tiba dan menemui massa aksi.
- F. Penyampaian dari massa aksi Sdr. Lalu Ibnu Hajar (Ketua Umum LSM Sasaka Nusantara NTB), yang intinya :
- Mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Fery (Manager PT. Samara Lombok) karena sudah bersedia menemui massa aksi.
 - Bahwa LSM Sasaka Nusantara NTB datang untuk mendampingi masyarakat yang dirugikan terkait penyelesaian tanah warga, dimana hasil investigasi di lapangan ada sekitar 8 (delapan) orang warga pemilik tanah yang diselesaikan yaitu :
 - o Bpk. H. Mastur, ybs merasa tidak pernah menjual tanahnya.
 - o Bpk. Bodak, masalah sisa tanah yang belum diselesaikan.
 - o Bpk. H. Zul, masalah sisa tanah yang belum diselesaikan.
 - o Bpk. Ahmad, masalah sisa tanah yang belum diselesaikan.
 - o Bpk. H. Lukaman, masalah sisa tanah yang belum diselesaikan.
 - o Bpk. Herman Dani, masalah sisa tanah yang belum diselesaikan.
 - o Bpk. Amiq Muh, masalah sisa tanah yang belum diselesaikan.
 - Meminta kepada pihak PT. Samara Lombok untuk menjelaskan terkait status 8 (delapan) orang tsb, kalau memang sudah diselesaikan, sama siapa menyelesaikannya dan mohon untuk dijelaskan.
 - Bahwa LSM Sasaka Nusantara tetap akan mendampingi masyarakat sampai masalah ini selesai, karena diduga ada indikasi permainan dalam jual beli tanah tersebut.
- G. Penyampaian oleh Sdr. Idris, yang intinya :
- Kedatangan kesini untuk mediasi agar PT. Samara Lombok bisa bekerja dengan aman, dengan tidak merugikan masyarakat setempat.
 - Bahwa datang kesini untuk mendampingi masyarakat, karena kita tahu masyarakat masih kurang paham tentang masalah hukum, sehingga LSM Sasaka datang untuk mendampingi masyarakat.
 - Massa aksi juga ingin tahu apakah semua prosedur dalam pembangunan sudah dipenuhi atau belum.
 - Terkait masalah data tanah yang belum diselesaikan, agar bisa dijelaskan karena masalah tanah ini adalah masalah perdata.
- H. Tanggapan/penyampaian dari Bpk. Fery (Manager PT. Samara Lombok), yang intinya :
- Bahwa kehadiran PT. Samara Lombok kesini adalah untuk membangun daerah dan mungkin ada keluarga massa aksi juga yang banyak bekerja disini.

- Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan haknya, kami disini tidak bisa menjawab karena bukan ranah kewenangan ybs untuk menjawab dan ybs tidak ada membawa data dimaksud.
- Dalam posisi saat ini, pihaknya tidak bisa menjawab karena masuk ke ranah perdata. Mungkin bisa ada tempat seperti di Kantor Kecamatan sebagai tempat untuk melakukan mediasi atau menjelaskan dan bisa sama-sama ditentukan waktunya kapan.
- I. Pukul 11.50 WITA, Setelah mendengar penjelasan dari pihak Management PT. Samara Lombok dan disepakati waktu untuk dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Praya Barat Daya, massa aksi dari LSM Sasaka Nusantara NTB dan warga membubarkan diri meninggalkan lokasi PT. Samara Lombok.
- J. Pukul 12.00 WITA, Aksi selesai, berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

III. Pendapat Pelapor

- A. Bahwa pada saat aksi berlangsung, sempat terjadi tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Oknum Massa Aksi terhadap Security PT. Samara Lombok dan LSM Sasaka Nusantara NTB meminta Laporan Pengancaman dicabut serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi.
- B. Bahwa aksi massa tersebut dilakukan karena diduga adanya mafia tanah/kejahatan dalam pembebasan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan/Management PT. LOMBOK TOROK DEVELOPMENT (SAMARA LOMBOK AND GROUP) terhadap pemilik tanah seluas 9,5 Hektare, seperti ada warga yang merasa tidak pernah menjual tanahnya, ada yang hanya menerima DP saja, ada yang hanya dibayarkan setengah, tetapi tanah warga tersebut dikuasai dan disertifikatkan atas nama PT. Samara Lombok.
- C. Bahwa hasil kesepakatan kedua belah pihak, maka akan dilakukan proses mediasi di Kantor Camat Praya Barat Daya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dengan membawa data masing-masing.

3. FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)



3. Meningkatnya Kohesivitas Sosial

a. Indikator Ke – 1 : Indeks Kerukunan

- Kerukunan Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Indeks Kerukunan dihitung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji teori-teori yang ada menggunakan metode survei untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan yang bertujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu situasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran berbentuk kuesioner sebagai alat wawancara yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara konstruk dengan indikator-indikatornya dan melakukan pengujian hipotesis. Analisis data yang dilakukan bersifat statistik dengan permodelan Rasch, dengan mengambil sampel secara acak berdasarkan jenjang desa/ kelurahan pada setiap Kecamatan (Area Sampling Probability atau Multi stage Random Sampling dengan Primary Sampling Unit Desa).

Tabel 3.5
Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)	Target Akhir Renstra	SumberData
1	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	Poin	67,32	55,67	82,69 %	-	67,52	Survei

- Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke – 3 dengan indikator Indeks Kerukunan pada Tahun 2023 tercapai 82,69 % atau termasuk dalam kategori Baik

4. Meningkatnya Kualitas Demokrasi

a. Indikator Ke – 1 : Indeks Demokrasi

- Indeks Demokrasi Indonesia (INDEKS DEMOKRASI) adalah angka - angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi dan bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia
- Survei Indeks Demokrasi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji teori-teori yang ada menggunakan metode survei untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan yang bertujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu situasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran berbentuk kuesioner sebagai alat wawancara yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara konstruk dengan indikator-indikatornya dan melakukan pengujian hipotesis. Analisis data yang dilakukan bersifat statistic dengan permodelan Rasch, dengan

mengambil sampel secara acak berdasarkan jenjang desa/ kelurahan pada setiap Kecamatan (Area Sampling Probability atau Multi stage Random Sampling dengan Primary Sampling Unit Desa)

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran Strategis 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)	Target Akhir Renstra	SumberData
1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	Poin	67,32	57,34	85,17 %	-	67,52	Survei

- Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke – 4 dengan indikator Indeks Demokrasi pada Tahun 2023 tercapai 85,17 % atau termasuk dalam kategori Baik

Sementara itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya jika di lihat dari pagu dana yang diberikan Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tiap tahun anggaran akan didapati kenaikan anggaran baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk menopang kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2023
1	5.801.045.682	26.331.060.430

Dengan jumlah 23 orang ASN dan 4 orang Non ASN yang latar belakang disiplin ilmunya yang berbeda-beda, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator utama harus benar-benar diperhitungkan. Seiring dengan kenaikan anggaran yang diberikan harus membuat kinerja ASN Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lombok Tengah juga harus semakin meningkat.

Sementara realisasi kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Nasional lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal atau Standar Nasional Lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan urusan pemerintahan umum, tidak melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sehingga tidak ada indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

Sementara itu untuk capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator: Nilai SAKIP OPD, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan kategori peringkat B (Baik) dengan nilai 62,50. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sudah “baik” jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
Perencanaan Kinerja	30	19,35	20,10
Pengukuran Kinerja	30	19,00	20,40
Pelaporan Kinerja	15	8,60	9,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00	12,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,95	62,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B (Baik)	B (Baik)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan manajemen kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 61,95 meningkat menjadi 62,50, dikarenakan dari sebagian besar rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti walaupun tidak signifikan. Secara umum, penerapan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah secara intensif dilakukan sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %, maka realisasi anggaran sebesar 99,59 % menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani	100 %	100 %	100 %	356.815.303	351.216.803	98,43 %
Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %	100 %	100 %	20.009.788.827	20.006.362.177	99,86 %
	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %	100 %	100 %	2.943.823.231	2.927.638.205	99,45 %
Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,32	55,67	82,69 %	101.054.306	90.936.906	89,99
Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	67,32	57,34	85,17 %	101.054.306	90.936.906	89,99

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	46,15	89,74	194,45		
Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	-	-	-		
				Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	100	100	100		
				Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	50	50	100		
	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	90	90	100		
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100	100	100	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian Konflik Sosial	100	100	100	
	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	82,69						
Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	85,17							

Penjelasan program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya dengan Indikator: Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA Tertangani dengan target 100% telah berhasil tercapai sebesar 100 %.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan dengan Indikator : Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan dan Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan dengan target 100% telah berhasil tercapai sebesar 100 %. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis OPD Tahun 2023

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2022)	
1	Terwujudnya Nilai-Nilai Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	100%	Baik	100%	Baik	100%
2	Terwujudnya Nilai-Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat	2	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	100%	Baik	100%	Baik	100%
Rata-rata Total				100%	Baik	100%	Baik	

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok

Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam politik ;
2. Masih kurangnya komunikasi antar Organisasi Politik, Ormas dan Pemuda.
3. Menurunnya nilai – nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Fasilitasi pendirian tempat ibadah masih diperlukan karena masyarakat banyak yang kurang paham.
5. Pengawasan terhadap orang asing masih lemah.
6. Reformasi tentang deteksi dini masih kurang sarana dan prasarana.
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menyangkut keamanan dan ketertiban.
8. Kurangnya informasi yang cepat dan akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1
Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.695.567		2.695.567	2.695.567	100	Sekretariat
2.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD			3.301.035		3.301.035	3.301.035	100	Sekretariat
3.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD			1.087.735		1.087.735	1.087.735	100	Sekretariat
4.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD			2.051.683		2.051.683	2.051.683	100	Sekretariat
5.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA - SKPD			1.164.652		1.164.652	1.164.652	100	Sekretariat
6.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			90.938.306	10.116.000	90.936.906	90.936.906	89,99	Sekretariat
7.	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.479.918.709			2.419.008.819	2.419.008.819	97,54	Sekretariat

8.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.325.499		2.325.499	2.325.499	100	Sekretariat
9.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			16.192.744		16.192.744	16.192.744	100	Sekretariat
10.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.567.983	194.787.736	202.928.086	202.928.086	99,79	Sekretariat
11.	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.156.767		10.156.767	10.156.767	100	Sekretariat
12.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			4.440.000		4.440.000	4.440.000	100	Sekretariat
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			73.484.000		73.478.796	73.478.796	99,99	Sekretariat
14.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			34.433.246		33.518.896	33.518.896	97,34	Sekretariat
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.880.000		808.000	808.000	28,06	Sekretariat
16.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			76.644.000		76.644.000	72,069,290	94,03	Sekretariat
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka			8.016.669		8.008.069	8.008.069	99,89	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa

	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			7.493.524		7.483.624	7.483.624	99,87	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			991.566.806	6.500.000	997.186.230	997.186.230	99,91	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			29.740.000		29.740.000	29.740.000	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
5.	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.835.892		1.835.892	1.835.892	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya			3.954.807		3.954.807	3.954.807	100	Bidang Politik dan Ormas

	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
2.	Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			4.908.803		4.902.003	4.902.003	99,86	Bidang Politik dan Ormas
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			923.166.123		921.586.823	921.586.823	99,83	Bidang Politik dan Ormas
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan			19.073.563.843		19.073.408.093	19.073.408.093	99,99	Bidang Politik dan Ormas

	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			4.195.251		2.512.151	2.512.151	59,88	Bidang Politik dan Ormas
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			3.149.610		3.138.010	3.138.010	99,63	Bidang Politik dan Ormas
2.	Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			3.234.071		3.234.071	3.234.071	100	Bidang Politik dan Ormas
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan			65.497.265		65.497.265	65.497.265	100	Bidang Politik dan Ormas

	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
4.	Kegiatan Pelaksanaan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			18.077.155		18.077.155	18.077.155	100	Bidang Politik dan Ormas
5.	Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			8.083.865		8.068.465	8.068.465	99,81	Bidang Politik dan Ormas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3.678.275		3.678.275	3.678.275	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
2.	Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			8.893.932		8.881.132	8.881.132	99,86	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa

3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			292.290.010		286.713.610	286.713.610	98,09	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			48.026.000		48.016.700	48.016.700	99,98	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3.927.086		3.927.086	3.927.086	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
1	Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi			4.046.839		4.046.839	4.046.839	100	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
2.	Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			67.898.987		66.213.987	66.213.987	97,52	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			382.316.872		372.010.222	372.010.222	97,58	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			208.145.611		208.145.611	208.145.611	95,95	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,			49.781.772		46.521.572	46.521.572	93,45	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
6.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1.088.438.293		1.088.438.293	1.088.438.293	100	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dari tabel diatas dapat dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisiensi dan dapat diukur hasilnya.
2. Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
3. Kegiatan yang bersifat rutin terdapat sisa anggaran dikarenakan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti sisa honorarium jasa pengajar/narasumber, sisa belanja makan/minum, sisa belanja modal dan sisa penggunaan biaya perjalanan dinas.

Sehingga dengan melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah secara umum efisien

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan bahwa sasaran - sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 dikategorikan **memuaskan**, karena nilai capaiannya masih dalam standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Disadari bahwa selama tahun 2023 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik termasuk pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, isu-isu lintas sektoral, upaya Cegah Dini dan Deteksi Dini, pelayanan administrasi/rekomendasi terhadap Ormas, LSM dan Yayasan serta Implementasi Konsensus/4 PILAR. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah progresif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi / perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pelayanan dan pengalokasian anggaran.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 belum memenuhi harapan seluruh masyarakat, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

Praya, 31 Desember 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Kabupaten Lombok Tengah,



Murdi, AP, M.Si

NIP. 197512311994121002

MATRIKS HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

NO.	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN SKPD TAHUN 2023	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2023
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	Ahlaqul Karimah dan Penanaman Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan sosial budaya	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA tertangani	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan sosial budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	356.815.303
2	Meningkatnya Moderasi Beragama		Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase Konflik Berlatar Belakang Politik terselesaikan	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.045.152.891
				Persentase Konflik Berlatar Belakang Sosial Ekonomi Terselesaikan	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Bebas Temuan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	20.009.788.827
			Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Indeks Kerukunan	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	98.041.966

			Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.800.628.374
						Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,732,585,348
						Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,732,585,348

Praya, 31 Desember 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah,



Murdi, AP, M.Si
NIP. 197512311994121002